



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 719 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TERPUSAT PADA PERGURUAN TINGGI VOKASI LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam visi dan misi, serta meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada perguruan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPUSAT PADA PERGURUAN TINGGI VOKASI LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan sebagai petunjuk dan acuan bagi perguruan tinggi vokasi.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia KP



Rudi Alek Wahyudin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 719 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TERPUSAT PADA
PERGURUAN TINGGI VOKASI LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN TERPUSAT PADA
PERGURUAN TINGGI VOKASI LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

Amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk menyelenggarakan tridharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada segmen regulasi ini, kegiatan penelitian di perguruan tinggi vokasi, diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Amanah ini pula tertuang dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan penelitian dilakukan oleh *civitas* akademika yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi dosen dan jalur kompetisi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 memberikan amanat tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menggarisbawahi bahwa perguruan tinggi bertugas mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui pendidikan untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam menyiapkan sumber daya manusia, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu tujuan Sistem Nasional IPTEK adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia yang memiliki arti bahwa perguruan tinggi yang didukung oleh lembaga litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), dan Badan Usaha). Tenaga terampil pendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusinya untuk memperkuat kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEKS untuk dapat dijadikan sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Perguruan tinggi diharapkan mampu mendorong dan menghasilkan banyak invensi dan inovasi serta hilirisasi teknologi tepat guna.

Secara umum, kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta dapat menjawab isu-isu strategis dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Melaksanakan pengembangan penelitian unggulan spesifik dan mengembangkan model pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian dalam bidang kelautan dan perikanan;
4. Mencapai dan meningkatkan kualitas dan mutu penelitian sesuai dengan target dan relevansi bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta bagi masyarakat pada sektor kelautan dan perikanan khususnya;
5. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik dan ilmiah, temuan kajian teknologi atas berbagai kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat umum, serta masyarakat bidang perikanan dan kelautan baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Meningkatkan kegiatan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) secara nasional dan internasional atas produk ciptaan yang dihasilkan;
7. Melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, baik dilihat dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya pada sektor kelautan dan perikanan; dan
8. Melaksanakan alih teknologi dan keilmuan kepada masyarakat untuk dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan martabat manusia yang berkeadilan *gender* dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya pesisir dan laut yang dimiliki.

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yang ada di PTV, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) secara penuh mendorong dan memfasilitasi bagi seluruh dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, serta kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Berbagai program penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BPPSDM KP mencakup bidang ilmu kelautan dan perikanan sebagaimana dimuat dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan.

Dalam mengembangkan program-program penelitian secara langsung ke PTV, BPPSDM KP juga senantiasa membangun relasi kerja sama dengan berbagai *stakeholder*, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, kerjasama dalam tingkat nasional telah dilakukan dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti Kementerian/non-Kementerian, Pemerintah Daerah, *Non-Government Organization* (NGO), lembaga dan kelompok kemasyarakatan, serta Industri Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA). Selain itu, BPPSDM KP juga semakin mengembangkan jejaring kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai *stakeholder* internasional seperti lembaga-lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan yang berasal dari berbagai negara di dunia.

Kegiatan penelitian terpusat pada PTV lingkup BPPSDM KP pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

Untuk dapat memfasilitasi segala kegiatan penelitian, BPPSDM KP membangun portal Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA KKP). BIMA KKP diharapkan dapat memfasilitasi terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

BAB 2

PROGRAM PENELITIAN

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 11 PTV yang sangat beragam. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan target untuk Perguruan Tinggi, yaitu satu perguruan tinggi harus mencapai peringkat 200 teratas dalam *World University Rankings* (WUR), dan dua perguruan tinggi mencapai peringkat 300 teratas, dan tiga perguruan tinggi mencapai peringkat 500 teratas. Selain itu, pemerintah mengarahkan perguruan tinggi untuk mengaplikasikan dan mengkomersialisasikan kekayaan intelektual, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

A. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

Program penelitian di perguruan tinggi KKP diarahkan untuk mendukung pencapaian standar penjaminan mutu penelitian. Ketentuan umum untuk mengatur pelaksanaan program penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap PTV lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
2. Ketua peneliti harus bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian;
3. Anggota peneliti terdiri dari dosen, peneliti / praktisi dari lembaga mitra strategis, dan taruna / mahasiswa;
4. Seorang dosen maksimal dapat mengajukan satu proposal penelitian sebagai ketua pengusul dan dua proposal penelitian sebagai anggota. Jika tidak mengajukan sebagai ketua pengusul maka yang bersangkutan dapat mengajukan tiga proposal penelitian sebagai anggota;
5. Sistematika Proposal penelitian sesuai dengan Tabel 2 diajukan melalui portal BIMA KKP, disertai dengan sampul/cover proposal (Format Cover sesuai dengan Format 1) dan harus mendapatkan persetujuan Direktur PTV lingkup KKP dari institusi asal ketua pengusul (Pengesahan Penelitian sesuai dengan Format 2);
6. Setiap peneliti harus membuat catatan mingguan (*logbook*) yang mencakup perkembangan penelitian sesuai dengan tahap proses penelitian. *logbook* dideposit pada laman BIMA KKP sebagai bagian dari dokumen laporan akhir penelitian;
7. Peneliti wajib mencantumkan:
 - a. sumber pendanaan (yaitu: BPPSDM KP) dan tahun pendanaan pada setiap luaran penelitian, baik dalam bentuk publikasi ilmiah, makalah presentasi, poster dan bentuk publikasi lainnya.
 - b. lembaga perguruan tinggi, Sub Rumpun Kelompok Keilmuan Dosen (KKD), dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA) dalam setiap luaran yang dihasilkan (contoh: Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Sub Rumpun Ilmu (SR) Profilaksis, Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA) Pencegahan dan Penanganan Penyakit).

8. Jika penelitian dihentikan sebelum waktunya karena kesalahan peneliti, (menerima pendanaan ganda untuk satu topik penelitian yang sama, atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai), maka ketua peneliti tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian selama dua tahun berturut-turut dan harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
9. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PTV, dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
10. Khusus penelitian dengan durasi pendanaan tahun jamak (dua tahun), jika hasil evaluasi tahun pertama tidak mencapai target luaran maka penelitian tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya; dan
11. Pertanggungjawaban dana penelitian mengikuti ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B. KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pengusulan proposal penelitian memerlukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merujuk pada SBK Riset yang berlaku. Justifikasi RAB harus didasarkan pada kebutuhan penelitian yang sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan fokus bidang penelitian. Rincian RAB mencakup pengeluaran untuk alat, bahan, sewa peralatan, pengumpulan data, analisis sampel, pelaporan, dan luaran wajib sesuai dengan Format 3.

C. PENGELOLAAN PROGRAM PENELITIAN

1. Tahapan Pengumuman

Pengumuman penerimaan proposal (*call for proposal*) penelitian dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan kepada sivitas PTV KKP dan diunggah pada laman BIMA KKP.

2. Tahapan Program Penelitian

Proses tahap pengajuan proposal hingga pelaporan akhir penelitian diuraikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan dan jadwal program penelitian

No	Kegiatan	Waktu*
1	<i>Call for proposal</i>	M1 Oktober
2	Pengajuan Proposal (Unggah pada laman BIMA KKP)	M2 Oktober - M2 November
3	Proses <i>Peer Review</i>	M3 - M4 November
4	Penetapan dan Pengumuman Proposal yang lolos seleksi	M1 - M4 Desember
5	Pelaksanaan Kegiatan	M1 Januari - M4 November

No	Kegiatan	Waktu*
6	Penyampaian Laporan Kemajuan 70%	M3 Agustus
7	Monitoring Kegiatan	M3 Agustus - M4 September
8	Penyampaian Laporan Akhir	M4 November

Keterangan:

1. M: Minggu
2. * Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan disampaikan melalui surat edaran terlebih dahulu.

3. Tahapan Seleksi

Tahapan seleksi proposal penelitian terdiri dari dua tahap, yakni:

- a. Seleksi Administrasi, yang bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan panduan yang akan menjadi dasar untuk tahap berikutnya.
- b. Seleksi Substansi, yang bertujuan untuk mengevaluasi substansi penelitian dan kelayakan RAB dengan merujuk pada kriteria seleksi yang telah ditetapkan.

4. Tahap Penetapan

Penetapan proposal penelitian yang layak mendapatkan pendanaan dari BPPSDM KP dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan seleksi substansi oleh pihak *reviewer*. Besaran dana yang disetujui merupakan kebijakan BPPSDM KP dengan mempertimbangkan saran *reviewer* serta ketersediaan anggaran. *Reviewer* melakukan penilaian Proposal Penelitian dengan menggunakan Formulir Penilaian Proposal Penelitian, sebagaimana tercantum dalam Format 4. Pengumuman Proposal yang lolos seleksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPSDM KP dan akan langsung disampaikan melalui laman BIMA KKP.

5. Tahap Pelaksanaan

Proses pelaksanaan program penelitian diuraikan sebagai berikut:

- a. Kontrak pendanaan penelitian ditandatangani oleh ketua pengusul dan Kepala Pusat Pendidikan KP; dan
- b. Dana penelitian akan disalurkan dalam dua termin, yaitu 70% pada termin I dan 30% pada termin II.

6. Tahap Pelaporan

Dosen yang terlibat dalam penelitian wajib menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan penelitian sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Laporan kemajuan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 70% kegiatan penelitian;

- b. Ketua tim peneliti harus mencatat perkembangan mingguan (*logbook*), menyusun laporan kemajuan, serta melaporkan hasil penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan melalui laman BIMA KKP;
 - c. Laporan akhir Hasil Penelitian merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh kegiatan (100%) pada semua skema pendanaan penelitian; dan
 - d. Untuk seluruh skema pendanaan penelitian, kelompok Peneliti diwajibkan mengunggah video profil penelitian di kanal youtube, selanjutnya tautan video dituliskan pada laporan akhir penelitian.
7. Tahapan Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- Tahap pemantauan/Monev adalah bentuk penilaian atas pelaksanaan program penelitian berdasarkan laporan kemajuan penelitian. Tim Monev terdiri dari Pusat Pendidikan KP, mitra bestari, dan P3M PTV KKP.
8. Tahapan Evaluasi Keberlanjutan Program Penelitian Tahun Jamak
- Tahapan evaluasi keberlanjutan adalah penilaian atas laporan akhir tahun pertama program ini bertujuan untuk menilai dan menentukan kelanjutan pendanaan pada tahun berikutnya.
9. Tahapan Penilaian Hasil dan Validasi Luaran Penelitian
- Tahapan penilaian hasil dan validasi luaran penelitian adalah penilaian terhadap pencapaian program penelitian pada laporan akhir dan luaran yang dihasilkan. Jika luaran belum memenuhi target yang tercantum dalam kontrak penelitian, maka ketua tim peneliti akan diberikan kesempatan untuk memenuhi luaran tersebut.

Tabel 2. Sistematika Proposal/Laporan Kemajuan/Laporan Akhir

PROPOSAL PENELITIAN	LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN (capaian 70 %)	LAPORAN AKHIR PENELITIAN (capaian 100%)
Total 12-15 halaman	Total 20-25 halaman	Total 30-35 halaman
Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1, Margin 3 cm, rata kanan-kiri	Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1, Margin 3 cm, rata kanan-kiri	Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1, Margin 3 cm, rata kanan-kiri
Halaman Sampul	Halaman Sampul	Halaman Sampul
Halaman Pengesahan	Halaman Pengesahan	Halaman Pengesahan
-	-	Ringkasan
Pendahuluan a. Latar belakang; b. Rumusan masalah; dan c. Tujuan penelitian (minimal 8 referensi).	Pendahuluan a. Latar belakang; b. Rumusan masalah; dan c. Tujuan penelitian (minimal 8 referensi).	Pendahuluan a. Latar belakang; b. Rumusan masalah; dan c. Tujuan penelitian (minimal 8 referensi).

PROPOSAL PENELITIAN	LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN (capaian 70 %)	LAPORAN AKHIR PENELITIAN (capaian 100%)
Tinjauan Pustaka (minimal 20 referensi)	Tinjauan Pustaka (minimal 20 referensi)	Tinjauan Pustaka (minimal 20 referensi)
Metode Penelitian	Metode Penelitian	Metode Penelitian
Target luaran: a. Jurnal Ilmiah; b. Buku ber-ISDN; c. <i>Policy Brief</i> ; d. Proptotipe teknologi; dan e. Kekayaan Intelektual.	Target luaran: a. Jurnal Ilmiah; b. Buku ber-ISDN; c. <i>Policy Brief</i> ; d. Proptotipe teknologi; dan b. Kekayaan Intelektual.	Realisasi Target luaran: a. Manuskrip Jurnal Ilmiah; b. Draft Buku ber-ISDN; c. <i>Draft Policy Brief</i> ; d. Proptotipe teknologi; dan e. Kekayaan Intelektual. Status luaran minimal: a. Submission manuscript; b. Dokumen hasil uji prototype; dan c. Dokumen usulan kekayaan intelektual.
Jadwal Penelitian a. Tahun ke 1; dan b. Tahun ke 2 (opsional).	Jadwal Penelitian a. Tahun ke 1; dan b. Tahun ke 2 (opsional).	Jadwal Penelitian a. Tahun ke 1; dan b. Tahun ke 2 (opsional).
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian <i>disajikan secara tabulatif dan sesuai dengan alokasi skema penelitian</i>	Hasil Sementara a. Tabel dan uraiannya b. Grafik dan uraiannya c. Gambar penunjang	Hasil dan Pembahasan a. Hasil; dan b. Pembahasan.
Daftar Pustaka (Harvard Style: minimal 30 referensi)	Realisasi Anggaran Biaya <i>disajikan secara tabulatif</i>	Realisasi Anggaran Biaya <i>disajikan secara tabulatif</i>
Lampiran a. Curriculum Vitae Ketua Pengusul dan Anggota; dan b. Dokumen Sahih Profil Mitra.	Daftar Pustaka (Harvard Style: minimal 30 referensi)	Daftar Pustaka (Harvard Style: minimal 35 referensi)

PROPOSAL PENELITIAN	LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN (capaian 70 %)	LAPORAN AKHIR PENELITIAN (capaian 100%)
	Lampiran	Lampiran c. bukti capaian luaran; d. bukti kwitansi dan nota realisasi biaya; dan c. <i>logbook</i> .

Format 1. Halaman Sampul

PROPOSAL / LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR



JUDUL

Tahun ke-.....dari rencana.....tahun

Ketua Pengusul

Anggota

(Nama Lengkap (tanpa gelar) dan NIDN)

PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SDM KP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Tahun

Format 2. Pengesahan Penelitian

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul :

Lokus Penelitian dan Inovasi :
(LOLITA)

Ketua Pengusul

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Jabatan Fungsional :

Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Anggota (1)

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Perguruan Tinggi :

Anggota (2)

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Perguruan Tinggi :

Anggota (ke-n)

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Perguruan Tinggi :

Lembaga Mitra (opsional)

Nama Lembaga :

Penanggung Jawab :

Alamat :

Tahun Pelaksanaan :

Usulan Biaya Tahun Pertama :

Usulan Biaya Tahun Kedua :

Kota, tanggal bulan tahun

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat*

Ketua Pengusul

(Nama Lengkap)
NIDN/NIP

(Nama Lengkap)
NIDN/NIP

Menyetujui,
Direktur,*

(Nama Lengkap)
NIDN/NIP

* Direktur dan Kepala P3M dari Institusi Ketua Pengusul

Format 3. Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENELITIAN

1. Honor (maksimal 5%: berlaku hanya untuk tenaga lapangan non pegawai KKP)					
Honor	Honor/ Jam (Rp)	Waktu OJ/OB	Jumlah	Honor Pertahun	
				Tahun 1	Tahun 2
1.....					
SUB TOTAL 1 (Rp)					
2. Belanja alat, bahan, dan sewa (minimal 50%)					
Komponen	Justifikasi Pemakaian	Volume	Harga satuan	Total Biaya (Rp)	
				Tahun 1	Tahun 2
Belanja alat (maks Rp.999.999 per item)					
Belanja bahan					
Belanja sewa					
SUB TOTAL 2 (Rp)					
3. Belanja Jasa lainnya (maksimal 20%)					
Komponen	Justifikasi Pemakaian	Volume	Harga satuan	Total Biaya (Rp)	
				Tahun 1	Tahun 2
Analisis sampel / Pengujian Laboratorium					
Biaya Publikasi Ilmiah					
SUB TOTAL 3 (Rp)					
4. Belanja Perjalanan dan ekspedisi (maksimal 15%)					

Komponen	Justifikasi Pemakaian	Volume	Harga satuan	Total Biaya (Rp)	
				Tahun 1	Tahun 2
Perjalanan pengambilan data					
Biaya Ekspedisi					
SUB TOTAL 3 (Rp)					
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp.)				Tahun 1	Tahun 2

Format 4. Formulir Penilaian Proposal Penelitian

FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

Nama Reviewer :

Instansi :

Judul Proposal

Skema Penelitian :

Kode Proposal :

No	Elemen Penilaian	%(a)	Nilai* (b)	Jumlah (axb)
1	Orisinalitas ide penelitian	20		
2	Tingkat Kebaruan (Novelty)	15		
3	Tingkat urgensi penelitian	5		
4	Kualitas tata cara penulisan	10		
5	Kesesuaian Metode Penelitian	10		
6	Kelayakan waktu dan sumber daya	5		
7	Kesesuaian bidang ilmu peneliti	5		
8	Inovasi dan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	10		
9	Tingkat pemanfaatan dan dampak penelitian	20		
Nilai Akhir ($\sum a \times b$):				

Kesimpulan dan saran:

Hasil Evaluasi

Skor	Keterangan	Status**
80 -	Diterima	
60 -	Dipertimbangkan	
<60	Ditolak	

....., Tanggal Bulan Tahun
Reviewer

Nama Lengkap

* Skala Nilai dari 0 s.d 100

**Berita tanda (V) untuk skor kesimpulan hasil evaluasi

BAB 3

PROGRAM PENELITIAN

A. SKEMA PROGRAM PENELITIAN

Saat ini BPPSDM KP menyelenggarakan 10 (sepuluh) skema penelitian yang didasarkan pada capaian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dan atau Kebaruan/temuan revolusioner yang diuraikan sebagai berikut:

1. Skema Penelitian Dasar (TKT 1-3)

- a. Penelitian Fundamental;
- b. Penelitian Kerja Sama;
- c. Penelitian Pascasarjana;
- d. Penelitian Dosen Pemula; dan
- e. Kajian Kebijakan Strategis KKP.

2. Skema Penelitian Terapan (TKT 4-6)

- a. Jalur Hilirisasi;
- b. Jalur Kepakaran; dan
- c. Jalur kewilayahan Regional.

3. Skema penelitian percepatan Guru Besar (Kebaruan atau penemuan tingkat tinggi atau TKT 7-9)

4. Skema Penelitian Pengembangan (TKT 7-9)

B. SKEMA PENELITIAN DASAR (PD)

Penelitian Dasar dapat memiliki orientasi pada observasi atau penemuan (inovasi) untuk mengantisipasi suatu fenomena, prinsip teoritis, model teknologi, penemuan atau konsep baru yang mendukung perkembangan ilmu dan teknologi di sektor Kelautan dan Perikanan. Skema Penelitian Dasar ini diarahkan untuk mendukung penelitian kolaboratif dan interdisipliner. Skema Penelitian Dasar dapat diajukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota peneliti terdiri dari kelompok dosen antar kampus di bawah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan fokus bidang ilmu dan kesubrumpunan kepakaran dosen (Lampiran 1.3) serta bidang fokus riset prioritas berdasarkan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA) yang sama (Lampiran 1.4);
2. Semua usulan proposal akan melewati proses seleksi dengan pendekatan *peer review* dari mitra bestari eksternal KKP; dan
3. Uraian pembiayaan akan disampaikan lewat surat edaran oleh Pusat Pendidikan KP.

Skema Penelitian Dasar adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Fundamental (PF)

Penelitian Fundamental menghasilkan prinsip dasar konsep teori dan teknologi, yang meliputi konsep desain metodologis, dan/atau aplikasi teknologi, serta pembuktian konsep tersebut. Luaran dan persyaratan pengusulan diatur sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian

Luaran yang harus dihasilkan setiap tahun dapat berupa:

- 1) Minimal satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3; atau
- 2) Satu buku hasil penelitian dengan nomor ISBN.

b. Persyaratan Pengusulan

Persyaratan pengajuan proposal sebagai berikut:

- 1) Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 3-5 kampus lingkup KKP;
- 2) Ketua pengusul minimal jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan (*Overall Score*) minimal 75 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 50 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
- 3) Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen antar kampus yang berbeda. Diharapkan, satu orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul; dan
- 4) Durasi pendanaan penelitian berlangsung selama 1 tahun (tahun tunggal).

2. Penelitian Kerjasama (PK)

a. Kerja Sama Dalam Negeri

Penelitian Kerjasama bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan kapasitas riset dan memajukan ilmu pengetahuan trans-disiplin dari bidang dan sub-rumpun ilmu serta Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA) yang berbeda (antar kampus KKP). Selanjutnya dosen KKP bekerjasama dengan mitra strategis.

Luaran dan persyaratan pengusulan diajukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian

Luaran yang wajib dihasilkan setiap tahun dapat berupa:

- 1) Minimal satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scimago Q4;
- 2) Satu buku hasil penelitian yang memiliki nomor ISBN; atau
- 3) Hasil penelitian juga dapat berupa Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham dengan pola kepemilikan bersama.

b. Persyaratan Pengusulan

Persyaratan untuk mengajukan proposal Penelitian Kerjasama disajikan sebagai berikut:

- 1) Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 5-7 kampus lingkup KKP dan lembaga mitra strategis;
- 2) Lembaga Mitra strategis yang dimaksud pada point (i) adalah pihak industri, lembaga riset, asosiasi dan mitra masyarakat (lembaga swadaya dan kelompok masyarakat) dan wajib memiliki dokumen kerjasama (MoU/PKS) dengan

salah satu lembaga pendidikan tinggi KKP yang terlibat dalam skema penelitian ini;

- 3) Ketua pengusul minimal jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan (*Overall Score*) minimal 75 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 50 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya; dan
- 4) Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen/peneliti antar kampus KKP dengan mitra strategis. Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen/peneliti tersebut diatas berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul;
- 5) Pengusulan penelitian harus melibatkan paling sedikit satu mahasiswa atau taruna yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- 6) Durasi pendanaan penelitian dari KKP berlangsung selama 1 tahun (tahun tunggal); dan
- 7) Kontribusi pendanaan mitra strategis dapat berupa Rupiah murni, fasilitas, jasa layanan dan sumber daya lainnya. Komponen dan besaran pendanaan dari mitra dituangkan ke dalam dokumen proposal.

b. Kerja Sama Luar Negeri

Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas riset antar lembaga, memperluas jejaring kerjasama bilateral dan multilateral. Luaran dan persyaratan pengusulan diajukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1) Luaran Penelitian

Luaran yang wajib dihasilkan setiap tahun dapat berupa:

- a) Minimal satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scimago Q4;
- b) Satu buku hasil penelitian yang memiliki nomor ISBN; atau
- c) Hasil penelitian dapat berupa Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham dengan pola kepemilikan bersama.

2) Persyaratan Pengusulan

Persyaratan untuk mengajukan proposal Penelitian Kerjasama luar negeri disajikan sebagai berikut:

- a) Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen/peneliti yang berasal dari 5-7 kampus lingkup KKP, lembaga mitra dalam negeri dan lembaga mitra luar negeri;
- b) Lembaga mitra luar negeri yang dimaksud pada point (i) adalah pihak industri, lembaga riset, asosiasi dan mitra masyarakat (lembaga swadaya dan kelompok masyarakat internasional) wajib memiliki dokumen kerjasama (MoU/PKS) dengan BPPSDM KP atau salah satu lembaga pendidikan tinggi KKP, lembaga mitra dalam negeri yang terlibat dalam skema penelitian ini;
- c) Ketua pengusul minimal jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan

- (*Overall Score*) minimal 100 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 75 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
- d) Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen/peneliti antar kampus;
 - e) KKP dengan mitra strategis dalam dan luar negeri;
 - f) Pengusulan penelitian harus melibatkan paling sedikit satu mahasiswa atau taruna yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
 - g) Durasi pendanaan penelitian dari KKP berlangsung selama 1 tahun (tahun tunggal);
 - h) Kontribusi pendanaan mitra strategis dalam dan luar negeri dapat berupa Rupiah murni, fasilitas, jasa layanan dan sumber daya lainnya. Komponen dan besaran pendanaan dari mitra dituangkan ke dalam dokumen proposal.

3. Penelitian Pascasarjana (PPS)

Penelitian Pascasarjana bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen KKP dalam menyelenggarakan penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa pascasarjana (Magister dan Doktoral) di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Luaran dan persyaratan pengusulan diajukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian

Hasil yang wajib dihasilkan meliputi:

- 1) Minimal satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2;
- 2) Satu buku hasil penelitian yang memiliki nomor ISBN; atau
- 3) Hasil penelitian juga dapat berupa Kekayaan Intelektual (KI) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham dengan pola kepemilikan bersama.

b. Persyaratan Pengusulan

- 1) Kelompok peneliti terdiri dari 4-7 dosen yang berasal dari 2-3 kampus lingkup KKP dan 1-2 perguruan tinggi non KKP;
- 2) Ketua pengusul minimal memiliki jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan (*Overall Score*) minimal 75 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 50 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
- 3) Anggota pengusul terdiri dari 3-6 dosen. Diharapkan, 1 orang diantara 3-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul; dan
- 4) Durasi pendanaan penelitian dari KKP berlangsung selama 1 tahun (tahun tunggal).

4. Penelitian Dosen Pemula (PDP)

Penelitian Dosen Pemula bertujuan untuk meningkatkan kapasitas riset, jejaring kerjasama, dan publikasi ilmiah. Luaran dan persyaratan pengusulan diajukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian

- 1) Minimal satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3;
- 2) Satu buku hasil penelitian yang memiliki nomor ISBN; atau
- 3) Hasil penelitian juga dapat berupa Kekayaan Intelektual (KI) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham dengan pola kepemilikan bersama.

b. Persyaratan Pengusulan

- 1) Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 2-3 kampus lingkup KKP;
- 2) Ketua pengusul minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli yang berasal dari kampus lingkup KKP dan memiliki ID SINTA;
- 3) Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen. Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul;
- 4) Durasi pendanaan penelitian dari KKP berlangsung selama 1 tahun (tahun tunggal); dan
- 5) Pengusul hanya diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada skema ini maksimal dua kali dalam tahun yang berbeda.

5. Penelitian Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

Penelitian Kajian Kebijakan Strategis bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan strategis KKP, dan/atau instansi pemerintah lainnya. Skema ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan strategis dalam memecahkan masalah publik yang dipandang penting dan mendesak. Luaran dan persyaratan pengusulan diajukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian

1. Minimal satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi terindeks Scimago Q4; atau
2. Luaran penelitian ini dapat berupa publikasi ilmiah, naskah akademik berupa rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan penting dan mendesak.

b. Persyaratan Pengusulan

1. Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 5-7 kampus lingkup KKP;
2. Ketua pengusul minimal memiliki jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan (*Overall Score*) minimal 75 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 50 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
3. Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen. Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan ketua pengusul; dan

4. Durasi pendanaan penelitian dari KKP berlangsung selama 1 tahun (tahun tunggal).

C. SKEMA PENELITIAN TERAPAN (PT)

Skema Penelitian Terapan secara keseluruhan terbagi menjadi tiga jalur, yakni jalur hilirisasi, jalur kepakaran, jalur kewilayahan regional. Jalur hilirisasi diarahkan untuk menjadi kelanjutan dari penelitian dasar dengan menghasilkan prototipe atau karya monumental, serta penyusunan naskah kebijakan sebagai luaran. Jalur kepakaran bertujuan untuk meningkatkan kapasitas riset serta menghasilkan penemuan revolusioner yang memiliki nilai kebaruan tinggi dan berdampak luas. Jalur kewilayahan regional diarahkan untuk mengkaji potensi wilayah, dinamika produktivitas, dan pembangunan berkelanjutan dalam bidang kelautan dan perikanan. Luaran dan persyaratan pengusulan diajukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota peneliti terdiri dari kelompok dosen antar kampus lingkup KKP dengan fokus bidang ilmu dan kesubrumpunan kepakaran dosen (Sesuai dengan Tabel 3) serta bidang fokus riset prioritas berdasarkan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA) yang sama (Sesuai dengan Tabel 4) ;
2. Semua usulan proposal akan melewati proses seleksi dengan pendekatan *peer review* dari mitra bestari eksternal KKP; dan
3. Uraian pembiayaan akan dijelaskan lewat surat edaran usulan proposal penelitian oleh Pusat Pendidikan KP.

Skema Penelitian Terapan adalah sebagai berikut:

1. Jalur Hilirisasi

Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian

Luaran berupa prototipe/karya monumental setiap tahun memiliki format sebagai berikut:

- 1) Tahun pertama: prototipe/karya monumental;
- 2) Tahun kedua: dokumen uji coba prototipe/karya monumental; dan
- 3) Selama periode penelitian, kelompok peneliti diharapkan dapat menghasilkan salah satu luaran dari opsi berikut:
 - a) Minimal satu artikel di jurnal internasional bereputasi Scimago Q3; atau
 - b) Kekayaan intelektual (KI) berupa paten/paten sederhana yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.

b. Persyaratan Pengusulan

- 1) Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 2-3 kampus lingkup KKP;
- 2) Ketua pengusul minimal jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan (*Overall Score*) minimal 100 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 75 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya.

- 3) Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen. Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul; dan
- 4) Penelitian bersifat tahun jamak, dengan jangka waktu penelitian 2 tahun dan hasil penelitian akan dievaluasi setiap tahun.

2. Jalur Kepakaran

Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Luaran penelitian

- 1) Minimal satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi Scimago Q3; dan
- 2) Menghasilkan karya monumental berupa prototipe teknologi kelautan dan perikanan (paten/paten sederhana) yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.

b. Persyaratan Pengusulan

- 1) Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 2-3 kampus lingkup KKP;
- 2) Ketua pengusul harus memiliki jabatan fungsional Lektor paling rendah dan mendapatkan SINTA Score keseluruhan (*Overall Score*) minimal 100 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 75 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
- 3) Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen. Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul; dan
- 4) Penelitian bersifat tahun jamak, dengan jangka waktu penelitian 2 tahun dan hasil penelitian akan dievaluasi setiap tahun.

3. Jalur Kewilayahan Regional

Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian

- 1) Minimal satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi Scimago Q3;
- 2) Menghasilkan buku hasil penelitian ber-ISBN; atau
- 3) Luaran penelitian ini dapat berupa publikasi ilmiah, naskah akademik berupa rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan penting dan mendesak.

b. Persyaratan Pengajuan

- 1) Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 2-4 kampus lingkup KKP;
- 2) Ketua pengusul minimal jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan (*Overall Score*) minimal 100 untuk bidang ilmu pengetahuan dan

- teknologi (Saintek) atau Skor 75 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
- 3) Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen. Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul; dan
 - 4) Penelitian bersifat tahun jamak, dengan jangka waktu penelitian 2 tahun dan hasil penelitian akan dievaluasi setiap tahun.

D. SKEMA PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR

Skema penelitian percepatan guru besar bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan syarat jabatan fungsional Guru Besar. Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Luaran Penelitian
 - a. minimal satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Scimago Q2;
 - b. Selama proses penelitian menghasilkan poster ilmiah yang didesiminasikan kepada masyarakat; dan
 - c. pada akhir periode penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat disampaikan dalam forum orasi ilmiah.
2. Persyaratan pengajuan
 - a. Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 2-3 kampus lingkup KKP;
 - b. Ketua pengusul harus berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala serta mendapatkan SINTA Score keseluruhan (Overall Score) minimal 200 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 100 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
 - c. Anggota pengusul terdiri dari 4-6 dosen antar kampus. Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul; dan
 - d. Penelitian bersifat tahun jamak, dengan jangka waktu penelitian 2 tahun dan hasil penelitian akan dievaluasi setiap tahun.

E. SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODUK (PP)

Skema Penelitian Pengembangan Produk bertujuan untuk mempercepat proses komersialisasi luaran penelitian yang melibatkan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA). Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini setiap tahunnya memiliki format sebagai berikut:

 - a. Tahun pertama: dokumen uji coba prototipe yang layak industri, yang diuji coba dalam lingkungan yang terbatas; dan
 - b. Tahun kedua: berupa dokumen uji coba prototipe yang layak industri, yang diuji coba dalam lingkungan sebenarnya dan menghasilkan dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) dan rencana bisnis.
2. Persyaratan Pengajuan
 - a. Kelompok peneliti terdiri dari 5-7 dosen yang berasal dari 2-3 kampus lingkup KKP, dengan minimal satu orang diantaranya berasal dari mitra IDUKA;
 - b. Mitra IDUKA yang dimaksud pada poin (a) adalah pihak industri yang memiliki dokumen kerjasama (MoU/PKS) dengan BPPSDM KP

atau salah satu lembaga pendidikan tinggi KKP yang terlibat dalam skema penelitian ini.

- c. Ketua pengusul minimal memiliki jabatan fungsional Lektor, dengan pencapaian reputasi Skor SINTA secara keseluruhan (*overall score*) minimal 150 untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Saintek) atau Skor 100 untuk bidang ilmu sosial, humaniora, dan kebijakan publik dan sumber daya;
- d. Diperlukan kehadiran mitra investor yang mengkonfirmasi komitmen untuk menyokong proyek dengan kontribusi dana tunai minimal 50% dari jumlah yang diajukan;
- e. Anggota tim pengusul terdiri dari 4-6 orang, Diharapkan, 1 orang diantara 4-6 dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan Ketua pengusul;
- f. Anggota tim peneliti dari mitra IDUKA minimal berjumlah satu orang yang terkonfirmasi melalui surat penunjukan dari lembaga/industri; dan
- g. Penelitian bersifat tahun jamak, dengan jangka waktu penelitian 2 tahun dan hasil penelitian akan dievaluasi setiap tahun.

Tabel 3. Rumpun, Subrumpun dan Bidang Ilmu Kepakaran Dosen

Kode	Bidang Ilmu	Level
100	RUMPUN ILMU PENANGKAPAN IKAN	1
110	Subrumpun Ilmu Perikanan	2
111	Pendugaan Stok	3
112	Tingkah Laku Ikan	3
113	Alat Penangkap Ikan	3
114	Teknologi Penangkapan Ikan	3
115	Penanganan Hasil	3
116	Perikanan Berkelanjutan	3
117	Manajemen Perikanan	3
120	Subrumpun Ilmu Pelayaran dan Pelabuhan	2
121	Manajemen Pengapalan	3
122	Pengawakan Kapal	3
123	Sistem Perkapalan	3
124	Sistem Navigasi	3
125	Komunikasi Maritim	3
126	Manajemen Pelabuhan dan Kesyahbandaran	3
127	Bangunan dan Stabilitas Kapal	3
130	Subrumpun Ilmu Keselamatan dan Kesehatan	2
131	Keselamatan	3
132	Kesehatan Kerja	3
133	Manajemen Perawatan	3
134	Manajemen Risiko	3
140	Subrumpun Ilmu Hukum dan Kebijakan	2
141	Kearifan Lokal	3
142	Etika Pengelolaan	3
143	Kebijakan Kelautan dan Perikanan	3
144	Peraturan Perikanan	3
145	Hukum Laut	3
150	Subrumpun Ilmu Kelautan	2
151	Oseanografi	3
152	Meteorologi Terapan	3
153	Akustik Perikanan	3
154	Batimetri	3
155	Sistem Informasi Geografis	3
156	Permodelan	3
157	Instrumentasi	3
158	Lingkungan Perairan	3
160	Subrumpun Ilmu Bisnis dan Manajemen	2
161	Ekonomi Perikanan	3
162	Sosiologi Perikanan	3
163	Pengambilan Keputusan	3
164	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
165	Manajemen Pemasaran	3
166	Kewirausahaan	3
167	Bisnis Perikanan	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
200	RUMPUN ILMU MEKANISASI PERIKANAN	1
210	Subrumpun Ilmu Material	2
211	Sistem Material	3
212	Konstruksi Bahan	3
213	Rancang Bangun	3
214	Teknik Proses Produksi	3
215	Fraktur Mekanik	3
216	Instrumentasi	3
217	Manufaktur	3
220	Subrumpun Ilmu Mekanik	2
221	Sistem Perpompaan	3
222	Refrigerasi	3
223	Perpipaan dan Instalasi	3
224	Transfer Panas dan Massa	3
225	<i>Head Recovery System</i>	3
226	Teknik Termal	3
230	Subrumpun Ilmu Energi	2
231	Energi Terbarukan	3
232	Konversi Energi	3
233	Proses Energi	3
234	Desalinasi	3
235	Analisis Energi	3
236	Energi Kelautan	3
237	<i>Storage System</i>	3
240	Subrumpun Ilmu Elektrik	2
241	Sistem Kontrol	3
242	Elektromagnetik	3
243	Mikro Elektronik	3
244	Semi Konduktor	3
245	Elektro Statis	3
246	Sistem Pembangkit Listrik	3
247	Proses Sinyal	3
250	Subrumpun Ilmu Keselamatan	2
251	Analisis Risiko dan Keselamatan	3
252	Analisis Pencegahan dan Kecelakaan	3
253	Manajemen Pemadam Kebakaran	3
254	Manajemen Perawatan	3
255	<i>Impact Engineering</i>	3
256	Teknik Keandalan	3
257	Polusi Lingkungan	3
260	Subrumpun Ilmu Manajemen dan Bisnis Perikanan	2
261	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
262	Kewirausahaan	3
263	Manajemen Teknik Mesin	3
264	Teknik Lingkungan	3
265	Mesin Kapal Perikanan	3
266	Pengolahan Hasil Perikanan	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
267	Keteknikan Akuakultur	3
300	RUMPUN ILMU PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1
310	Subrumpun Ilmu Biokimia Pangan	2
311	Kimia Pangan	3
312	Toksikologi	3
313	Nutrisi	3
314	Biokimia	3
315	Bahan Baku	3
316	Mikrobiologi	3
317	Analisis Biofisik	3
320	Subrumpun Ilmu Teknologi Pengolahan	2
321	Penanganan	3
322	Refrigerasi	3
323	Pengolahan Hasil Samping	3
324	Bioteknologi	3
325	Pengemasan	3
326	Pengolahan Hasil Perikanan	3
330	Subrumpun Ilmu Rekayasa Pangan	2
321	Rekayasa Bahan Baku	3
322	Pengembangan Produk	3
323	Rekayasa Pangan	3
324	Desain dan Tata Letak	3
330	Subrumpun Ilmu Mutu dan Keamanan Pangan	2
331	Sensori	3
332	Sanitasi dan Higiene	3
333	Analisis Risiko	3
334	Manajemen Mutu Terpadu	3
335	Bahan Tambahan Pangan	3
336	Sistem Keamanan Pangan Terpadu	3
340	Subrumpun Ilmu Ekonomi dan Manajemen	2
341	<i>Marketing</i>	3
342	Ekonomi dan Manajemen Pangan	3
343	Kewirausahaan	3
344	Keamanan Lingkungan	3
345	Manajemen Produksi	3
346	Ketahanan Pangan	3
347	Komunikasi Industri	3
350	Subrumpun Ilmu Hukum dan Kebijakan	2
351	Edukasi Pangan	3
352	Peraturan Pangan	3
353	Etika Pangan	3
354	Standarisasi dan Sertifikasi	3
400	RUMPUN ILMU AKUAKULTUR	1
410	Subrumpun Ilmu Reproduksi dan Genetika	2
411	Sistem Reproduksi	3
412	Endokrinologi Terapan	3
413	Embriologi Terapan	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
414	Rekayasa Genetika	3
420	Subrumpun Ilmu Kesehatan Ikan	2
421	Bioteknologi	3
422	Farmakologi Akuakultur	3
423	Epidemiologi	3
424	Patologi	3
425	Imunologi Terapan	3
430	Subrumpun Pakan dan Nutrisi	2
431	Makro dan Mikro Nutrien	3
432	Bahan Baku Pakan	3
433	Fisiologi Terapan	3
434	Biokimia Terapan	3
435	Nutrigenomik	3
436	Ikan dan Kesehatan Manusia	3
440	Subrumpun Lingkungan Akuakultur	2
441	Permodelan	3
442	<i>Integrated Aquaculture</i>	3
443	Akuakultur Berkelanjutan	3
444	Biosekuriti	3
445	Kajian Dampak	3
446	Toksikologi	3
450	Subrumpun <i>Engineering</i>	2
451	Teknik Pembenihan	3
452	Teknik Pembesaran	3
453	Desain Sistem	3
454	Rekayasa Bahan dan Peralatan	3
455	Panen dan Transportasi	3
456	Instrumentasi dan <i>Monitoring</i>	3
457	Teknik Disinfeksi	3
460	Subrumpun Sosial Ekonomi dan Regulasi	2
461	Regulasi dan Isu Global	3
462	Manajemen Usaha	3
463	Kelayakan Usaha	3
464	Kewirausahaan	3
465	Tata Niaga	3
466	Sosial Ekonomi Akuakultur	3
500	RUMPUN ILMU PENGELOLAAN SUMBER	1
510	Subrumpun Ilmu Biologi dan Ekologi	2
511	Diversitas Akuatik	3
512	Iktiologi Terapan	3
513	Sistematika	3
514	Biogeografi	3
515	Ekologi dan Etologi	3
516	Pendugaan Stok	3
520	Subrumpun Ilmu Konservasi Sumberdaya Perairan	2
521	Kawasan Lindung	3
522	Konservasi Ekosistem	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
523	Genetika Konservasi	3
524	Biologi Konservasi	3
530	Subrumpun Ilmu Oseanografi dan Limnologi	2
531	Oseanografi	3
532	Limnologi	3
533	Toksikologi	3
534	Produktivitas Perairan	3
535	Hidrobiologi	3
536	Perubahan Iklim	3
537	Permodelan	3
540	Subrumpun Ilmu Pengelolaan Lingkungan Perairan	2
541	Pengelolaan Lingkungan Terpadu	3
542	Restorasi Lingkungan	3
543	<i>Biomonitoring</i>	3
544	AMDAL	3
545	Kesehatan Lingkungan	3
546	Polusi Perairan	3
547	Daya Dukung	3
550	Subrumpun Ilmu Sosial Ekonomi dan Edukasi	2
551	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan	3
552	Ekonomi Sumberdaya Perairan	3
553	Evaluasi Sumberdaya Perairan	3
554	Sosiologi	3
555	Kearifan Lokal	3
556	Edukonservasi	3
557	Edu-ekowisata	3
560	Subrumpun Ilmu Etika, Kebijakan, dan Hukum	2
561	Peraturan Perikanan	3
562	Maritim	3
563	Manajemen Konflik	3
564	Kebijakan Sumberdaya Perairan	3
565	Etika Pengelolaan Sumberdaya Perairan	3
600	RUMPUN ILMU PENYULUHAN PERIKANAN	1
610	Subrumpun Ilmu Teknologi Perikanan	2
611	Penangkapan Ikan	3
612	Pengolahan Hasil Perikanan	3
613	Akuakultur	3
614	Bioteknologi Perikanan	3
620	Subrumpun Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Perairan	2
621	Konservasi Sumberdaya Perairan	3
622	Perubahan Iklim	3
623	Manajemen Lingkungan Perairan	3
624	Manajemen Sumberdaya Perairan	3
630	Subrumpun Ilmu Ekonomi dan Manajemen	2
631	Manajemen Sumberdaya Manusia	3
632	Manajemen Keuangan	3
633	Manajemen Pemasaran	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
634	Ekonomi Sumberdaya Perairan	3
635	Kewirausahaan	3
640	Subrumpun Ilmu Hukum dan Kebijakan	2
641	Maritim	3
642	Etika Pengelolaan	3
643	Pembangunan Masyarakat	3
644	Kebijakan Perikanan	3
650	Subrumpun Ilmu Komunikasi dan Edukasi	2
651	Teknik Komunikasi	3
652	Metode Penyuluhan	3
653	Desain dan Media	3
654	Psikologi Masyarakat	3
655	Perencanaan dan Evaluasi	3
656	Sistem Informasi	3
660	Subrumpun Ilmu Sosiologi	2
661	Kepemimpinan	3
662	<i>Gender</i>	3
663	Manajemen Konflik	3
664	Pemberdayaan	3
665	Sosiologi Masyarakat	3
666	Dinamika Sosial	3
700	RUMPUN ILMU AGRIBISNIS PERIKANAN	1
710	Subrumpun Kelembagaan	2
711	Model Kelembagaan	3
712	Kepemimpinan	3
713	<i>Mentorship</i>	3
714	Akreditasi	3
715	Kelembagaan Moneter	3
716	Kelembagaan Agribisnis	3
717	Jejaring dan Aliansi	3
720	Subrumpun Subsistem	2
721	Inovasi Teknologi Kemasan Produk	3
722	<i>Supply Chain</i>	3
723	Value Chain	3
724	Bahan Baku	3
725	Teknik Biosistem	3
726	Produksi	3
727	<i>Food Engineering</i>	3
730	Subrumpun Pemasaran	2
731	Teknik Pemasaran	3
732	Komunikasi Bisnis	3
733	Bisnis Rintisan/ <i>Start-up</i>	3
734	Digitalisasi Bisnis	3
735	Industri dan Ekonomi Kreatif	3
736	Strategi <i>Branding</i>	3
737	Konsumen	3
740	Subrumpun Manajemen	2

Kode	Bidang Ilmu	Level
741	Manajemen Usaha	3
742	Manajemen Produksi	3
743	Sistem Pengendalian	3
744	Manajemen Risiko	3
745	Manajemen Personalia	3
746	Manajemen Agribisnis	3
750	Subrumpun Perencanaan	2
751	Keamanan Pangan	3
752	Ekonomi Perikanan	3
753	Standardisasi	3
754	Sertifikasi	3
755	Bisnis Internasional	3
756	Sistem Pengendalian	3
760	Subrumpun Etika dan Kebijakan	2
761	Analisis Kebijakan	3
762	Regulasi	3
763	Etika Bisnis	3
764	Pengambilan Keputusan	3
765	Dasar-dasar manajemen	3
800	RUMPUN ILMU PATOLOGI PERIKANAN	1
810	Subrumpun Fisiologi dan Anatomi	2
811	Sistem Pencernaan	3
812	Sistem Pernafasan	3
813	Sistem Integumen	3
814	Sistem Kekebalan	3
815	Sistem Peredaran Darah	3
816	Metabolisme	3
820	Subrumpun Mikrobiologi	2
821	Fikologi	3
822	Parasitologi	3
823	Mikologi	3
824	Bakteriologi	3
825	Virologi	3
830	Subrumpun Patologi	2
831	Dermatologi	3
832	Histopatologi	3
833	Sitologi	3
834	Hematologi	3
835	Serologi	3
836	Patologi Molekuler	3
840	Subrumpun Profilaksis	2
841	Bioaktif	3
842	Pakan Fungsional	3
843	Probiotik	3
844	Vaksin dan Vaksinasi	3
845	Imunostimulan	3
846	Imunoprofilaksis	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
850	Subrumpun Terapeutik	2
851	Imunoterapeutik	3
852	Antibiotik	3
853	Farmakologi	3
854	Antivirulensi	3
855	Bakteriofag	3
856	Teknologi DNA/RNA	3
860	Subrumpun Kajian Dampak	2
861	Regulasi dan Isu Global	3
862	Kebijakan ekonomi	3
863	Manajemen Kesehatan Ikan	3
864	Lingkungan Budidaya	3
865	Kesehatan Manusia	3
866	Zoonosis	3
900	RUMPUN ILMU TEKNIK KELAUTAN	1
910	Subrumpun Hidrodinamika	2
911	Oseanografi	3
912	Mekanisasi Fluida	3
913	Gelombang Laut	3
914	Interaksi Struktur	3
915	Hidroelastisitas	3
916	Kelelahan dan Mekanika	3
917	Komputasi Fluida	3
920	Subrumpun Bangunan Lepas Pantai	2
921	Pengelasan	3
922	Permodelan Numerik	
923	Struktur Terapung	3
924	Dinamika Struktur	3
925	Mekanika Tanah dan Pondasi	3
926	Oseanografi Fisika	3
930	Subrumpun Energi dan Lingkungan	2
931	Mekanika Gelombang Laut	3
932	Kelistrikan	3
933	Energi Terbarukan	3
934	Konversi Energi	3
935	Desain Tubular	3
936	Desalinasi	3
937	Migas dan Energi laut	3
940	Subrumpun Manajemen Pantai	2
941	Struktur Pelindung Pantai	3
942	Reklamasi	3
943	Sedimentasi	3
944	Geodinamika Pantai	3
945	Manajemen Proyek	3
946	Kelayakan Bisnis	3
947	Ekonomi dan Bisnis Maritim	3
950	Subrumpun Teknologi Pengelolaan	2

Kode	Bidang Ilmu	Level
951	Lingkungan Laut	3
952	Oceanografi Kimia	3
953	Pencemaran	3
954	Kualitas Air	3
955	AMDAL	3
956	Sumberdaya Kelautan	3
957	Bioteknologi Laut	3
960	Subrumpun <i>Monitoring</i> Dan Asesmen	2
961	Akustik Kelautan	3
962	Genomika Kelautan	3
963	Selam Ilmiah	3
964	Geospasial	3
965	Ekologi Laut	3
966	Biodiversitas Laut	3
967	Biologi Laut	3
900	RUMPUN ILMU EKOWISATA BAHARI	1
910	Subrumpun Sumberdaya Kelautan	2
911	Ekologi Laut	3
912	Biologi Laut	3
913	Biogeografi	3
914	Oceanografi	3
915	Bioinvasi	3
916	Dinamika Pantai	3
917	Perubahan Iklim	3
920	Subrumpun Perlindungan Laut	2
921	Sistem Informasi Geografis	3
922	Tata Lingkungan	3
923	Perlindungan Spesies	3
924	Mitigasi Bencana	3
925	Restorasi	3
926	Perlindungan Ekosistem	3
930	Subrumpun Wisata Kreatif	2
931	Wisata Lintas Budaya	3
932	Wisata Pedesaan dan Kota	3
933	Wisata Religi	3
934	Gastronomi-Kuliner	3
935	Wisata Bawah Air	3
936	Wisata Komunitas	3
937	Wisata Alam Laut	3
940	Subrumpun Pengelolaan Wisata	2
941	Manajemen Perjalanan	3
942	Pengelolaan Destinasi	3
943	Keamanan dan Keselamatan	3
944	Kewirausahaan	3
945	Komunikasi Bisnis	3
946	Manajemen Perencanaan	3
947	Kepemanduan	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
950	Subrumpun Sosial Ekonomi dan Edukasi	2
951	Ekonomi Wisata	3
952	Pengetahuan Adat	3
953	Kearifan Lokal	3
954	Antropologi	3
955	Sistem Informasi dan Teknologi	3
956	Manajemen Bisnis	3
957	<i>Branding</i>	3
958	Iklan dan Promosi	3
960	Subrumpun Etika dan Kebijakan	2
961	Etika pariwisata	3
962	Pengelolaan Wisata Pantai	3
963	Diplomasi Wisata	3
964	Pariwisata Berkelanjutan	3
965	Regulasi	3
966	Analisis Kebijakan	3
1000	RUMPUN ILMU KONSERVASI	1
1010	Subrumpun Sumberdaya dan Iklim	2
1011	Sumberdaya Perairan	3
1012	Ekologi Perairan	3
1013	Biosistematik	3
1014	Tingkah Laku	3
1015	Bioinvasi	3
1016	Dinamika Populasi	3
1017	Perubahan Iklim	3
1020	Subrumpun Desain Kawasan	2
1021	Desain Konservasi	3
1022	Permodelan	3
1023	Sistem Informasi Geografi	3
1024	Limnologi	3
1025	Oseanografi	3
1026	Pemetaan	3
1027	Asesmen Sumberdaya Perairan	
1030	Subrumpun Konservasi	2
1031	Perlindungan Spesies	3
1032	Perlindungan Ekosistem	3
1033	Perlindungan Kawasan	3
1034	Perlindungan Genetis	3
1035	Restorasi	3
1036	<i>Monitoring</i> Kawasan	3
1037	Evaluasi Kawasan	3
1040	Subrumpun Pengelolaan Konservasi	2
1041	Manajemen Sumberdaya	3
1042	<i>Biomonitoring</i>	3
1043	Polusi Perairan	3
1044	Ekowisata Perairan	3
1045	Pemanfaatan Kemaritiman	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
1046	Pemanfaatan Perikanan	3
1047	Daya dukung	3
1050	Subrumpun Sosial Ekonomi dan Edukasi	2
1051	Sosiologi Pesisir	3
1052	Pengetahuan Adat	3
1053	Kearifan Lokal	3
1054	Jasa Ekosistem	3
1055	Ekonomi dan Evaluasi Sumberdaya	3
1056	<i>Citizen Science</i>	3
1057	Pendidikan Konservasi	3
1060	Subrumpun Etika dan Kebijakan	2
1061	Pembangunan Berkelanjutan	3
1062	Kebijakan Konservasi	3
1063	Pengambilan Keputusan	3
1064	Diplomasi Kelautan	3
1065	Regulasi dan Hukum	3
1066	Manajemen konflik	3
1067	Etika Pemanfaatan	

Tabel 4. Bidang Fokus Riset Prioritas berdasarkan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA)

No	Fokus Bidang Pengkajian berdasarkan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA)
1	Perikanan Tangkap
2	Manajemen Kepelautan dan Kepelabuhanan
3	Keselamatan
4	Teknologi Kelautan dan Perikanan
5	Sosial dan Ekonomi Perikanan
6	Ilmu Material
7	Mekanika dan Energi
8	Kelistrikan
9	Bioreproduksi dan Genetika
10	Kesehatan Ikan dan Bioteknologi
11	Pakan dan Nutrisi Akuakultur
12	Akuakultur Berkelanjutan
13	Keteknikan Akuakultur
14	Biokimia Pangan
15	Teknologi Pengolahan dan Bioteknologi
16	Keteknikan Pangan
17	Keamanan dan Kualitas Pangan
18	Sumberdaya Hayati Perairan dan Perubahan Iklim
19	Konservasi
20	Dinamika Perairan dan Perubahan Iklim
21	Lingkungan Perairan
22	Pengelolaan Sumberdaya Perairan

No	Fokus Bidang Pengkajian berdasarkan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA)
23	Komunikasi dan Edukasi Penyuluhan
24	Fisiologi
25	Mikrobiologi
26	Patologi Klinis dan Bioteknologi
27	Pencegahan dan Penanganan Penyakit
28	Dampak Patologi
29	Kelembagaan Agribisnis
30	Subsistem Agribisnis
31	Pemasaran
32	Pengelolaan Agribisnis
33	Hidrodinamika Laut
34	Bangunan Lepas Pantai
35	Energi Kelautan
36	Teknik Manajemen Pantai
37	Pengelolaan Pariwisata
38	Edu-ekowisata
39	Kebijakan Kelautan dan Perikanan
40	Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem

BAB 4

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian, khususnya bagi para dosen perguruan tinggi vokasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pengusul dan pelaksana program penelitian diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi vokasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, mitra strategis dalam negeri dan luar negeri dan stakeholder lainnya guna menghasilkan kegiatan dengan luaran yang memiliki nilai kemanfaatan yang luas. Kegiatan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan perikanan dan tridharma dosen dalam hal penelitian dengan pelaksanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Demikian Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan bagi kemajuan BPPSDMKP.

KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia KP,



Rudi Alek Wahyudin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PERGURUAN TINGGI VOKASI LINGKUP BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGABDIAN TERPUSAT KEPADA
MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI VOKASI LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran penting dalam memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Peran perguruan tinggi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui kegiatan PKM yang berangkat dari isu-isu penting yang menjadi tantangan dan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melaksanakan kegiatan PKM dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PKM merupakan diseminasi dari hasil penelitian, inovasi, dan seni yang dilakukan secara melembaga melalui pendekatan ilmiah langsung kepada sasaran yaitu masyarakat pelaku usaha perikanan, kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintah serta civitas akademik yang membutuhkannya dalam rangka program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat terpusat pada PTV lingkup BPPSDM KP pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

Kegiatan PKM diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif melalui penerapan standar dan kualitas penyelenggaraan. Petunjuk pelaksanaan PKM dapat memuat aspek-aspek penting meliputi pendekatan yang tepat, metode, pelaksanaan serta penilaian dan evaluasi hasil kegiatan. Hal ini penting agar lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa kegiatan PKM yang dilakukan memberikan dampak positif yang signifikan.

BAB II

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. KETENTUAN UMUM PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penerapan program PKM dilaksanakan berpedoman pada standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Dalam perihal tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menetapkan syarat umum pelaksanaan program PKM yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas KKP;
2. Ketua pelaksana program PKM adalah dosen tetap PTV KKP yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor;
3. Anggota yang terlibat dalam pelaksanaan program PKM adalah dosen yang mempunyai NIDN, NIDK atau calon dosen;
4. Melibatkan taruna / mahasiswa dalam pelaksanaan program PKM;
5. Usulan proposal PKM diajukan melalui laman BIMA KKP dan wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan PTV di tempat dosen tersebut bertugas;
6. Pada satu periode durasi kegiatan, setiap dosen dapat mengajukan maksimal dua usulan proposal PKM dengan skema satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota. Jika dosen tersebut bukan ketua pengusul, maka dapat mengusulkan dua usulan proposal sebagai anggota;
7. Jika pelaksanaan PKM dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana (terbukti memperoleh pendanaan ganda dari lembaga mitra di luar KKP atau mengusulkan kembali PKM yang telah didanai sebelumnya), maka ketua pelaksana tersebut dilarang mengajukan pendanaan selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
8. P3M atau sebutan lain dari lembaga sejenis memiliki tugas untuk melakukan pemantauan/ *monitoring* dan evaluasi (Monev) internal atas semua kegiatan PKM di masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
9. Pelaksana PKM diwajibkan membuat catatan kegiatan harian. Catatan harian harus mencakup detail pelaksanaan sesuai dengan tahapan proses yang telah ditentukan. Catatan harian disusun dan diunggah pada laman BIMA KKP sebagai bagian dari kelengkapan dokumen laporan akhir.

10. Pelaksana PKM yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema, diberikan batas waktu tertentu setelah berakhirnya pelaksanaan pengabdian untuk memenuhi kewajibannya. Jika luaran masih belum terpenuhi, akan dikenakan sanksi berupa larangan mengajukan usulan baru hingga luaran wajib terpenuhi sesuai target skema.
11. Pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pengabdian mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
12. Pelaksana PKM wajib menyebutkan sumber pendanaan dari BPPSDM KP dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran pelaksanaan pengabdian baik berupa publikasi ilmiah/media massa, makalah yang dipresentasikan, video, maupun poster.

B. KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pembiayaan PKM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku. Pelaksana PKM diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen Biaya Honorarium

Honorarium yang diajukan dalam RAB tidak boleh melebihi 15% dari total dana usulan. Honorarium dialokasikan kepada tenaga kerja lapangan, masyarakat, tenaga ahli/profesional, dan narasumber selain pegawai KKP. Honorarium harus disusun secara terperinci dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran honorarium dan memastikan tepat sasaran.

2. Komponen Teknologi dan Inovasi

Komponen teknologi dan inovasi yang diajukan minimal 40% dari total dana usulan. Komponen biaya ini hanya mencakup alat, bahan, sewa, dan jasa untuk mendukung terlaksananya kegiatan PKM.

3. Komponen Biaya Pelatihan

Pengajuan komponen biaya pelatihan maksimal 25%. Komponen biaya ini mencakup penyelenggaraan, lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pelatihan yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta dapat meningkatkan kompetensi tertentu, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi.

4. Komponen Biaya Perjalanan

Pengajuan komponen biaya perjalanan maksimal 15% dari total dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan/ *transport* dan akomodasi dalam negeri bagi peserta dan pelaksana PKM.

5. **Komponen Biaya Lainnya**

Pengajuan komponen biaya lainnya maksimal 15% dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pengelolaan program seperti Monev, pemenuhan biaya luaran, pendaftaran/pengurusan sertifikasi/label.

C. PENGELOLAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Secara umum, pelaksanaan PKM terdiri dari beberapa tahapan meliputi pengumuman (call for proposal), pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, Monev, pelaporan, dan penilaian luaran. Luaran tidak hanya berupa output jangka pendek (produk atau hasil konkret yang dihasilkan dari kegiatan PKM), namun diharapkan berupa outcome jangka panjang. Pembagian kewenangan setiap tahapan pelaksanaan PKM berdasarkan Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA). Seluruh tahapan kegiatan disampaikan oleh BPPSDM KP melalui laman BIMA KKP.

1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan PKM diawali dengan mengumumkan penerimaan usulan melalui laman BIMA KKP.

2. Tahap Pengusulan

- a. Alur tahap pengusulan proposal PKM dapat dilihat pada laman BIMA KKP;
- b. Sistematika penyusunan proposal dapat dilihat pada Tabel 2, disertai dengan sampul/cover proposal (Format Cover sesuai dengan Format 1) dan harus mendapatkan persetujuan Direktur PTV lingkup KKP dari institusi asal ketua pengusul (Pengesahan PKM sesuai dengan Format 2);

3. Tahap Penyeleksian

Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh BPPSDM KP. Seleksi usulan dilakukan melalui BIMA KKP. Tahapan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian penulisan proposal sesuai panduan yang akan menjadi dasar dalam pertimbangan untuk ke tahap seleksi substansi.

b. Seleksi Substansi

Seleksi substansi proposal mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan meliputi beberapa elemen utama. Seleksi ini dilaksanakan oleh Reviewer. Reviewer melaksanakan penilaian sesuai dengan Format 3.

4. Tahapan Penetapan

- a. Penetapan usulan proposal yang layak untuk didanai diumumkan oleh BPPSDM KP melalui laman BIMA KKP; dan

- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan BPPSDM KP dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran.

5. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan PKM diuraikan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan Kontrak Program PKM; dan
- b. Pencairan dana dan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak.

6. Tahap Pelaporan

Pelaksana PKM berkewajiban memberikan laporan akhir mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua tim pelaksana PKM wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan akhir, luaran kegiatan, dan penggunaan anggaran 100% sesuai tenggat waktu yang ditentukan dan diunggah pada laman BIMA KKP;
- b. Sistematika laporan akhir dapat dilihat pada lampiran 2.1.c
- c. Ketua tim pelaksana wajib mengunggah dokumen berupa hasil PKM dalam bentuk presentasi *Power Point (maksimal 25 slide)* dan poster ukuran A1; dan
- d. Ketua tim pelaksana wajib mengunggah hasil PKM dalam bentuk video (tautan video) berdurasi maksimal 10 menit meliputi semua tahapan kegiatan PKM.

7. Tahapan Pemantauan/Monev

Ketentuan tahapan pemantauan/*Monev* diuraikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

- a. P3M wajib melaksanakan *Monev* internal secara berkala; dan
- b. BPPSDM KP melakukan *Monev* program PKM pada akhir tahun.

Tabel 1. Tahapan dan jadwal program PKM.

No	Kegiatan	Waktu *
1	<i>Call for proposal</i>	M1 Oktober
2	Pengajuan Proposal (Unggah pada laman BIMA KKP)	M2 Oktober - M2 November
3	Proses <i>Peer Review</i>	M3 - M4 November
4	Penetapan dan Pengumuman Proposal yang lolos seleksi	M1 - M4 Desember
5	Pelaksanaan Kegiatan (untuk 2 semester)	M1 Januari - M4 November
6	Monitoring Kegiatan	M3 Agustus - M4 September

7	Penyampaian Laporan Akhir	M4 November
---	---------------------------	-------------

Keterangan:

M: Minggu

* Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan disampaikan melalui surat edaran terlebih dahulu.

Tabel 2. Sistematika Proposal/Laporan Akhir PKM

PROPOSAL PKM	LAPORAN AKHIR PKM (capaian 100%)
Total 10-15 halaman	Total 20-25 halaman
Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1, Margin 3 cm, rata kanan-kiri	Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1, Margin 3 cm, rata kanan-kiri
Halaman Sampul	Halaman Sampul
Halaman Pengesahan	Halaman Pengesahan
-	Ringkasan
Pendahuluan a. Latar Belakang; b. Rumusan Masalah; dan c. Tujuan PKM (minimal 5 referensi).	Pendahuluan a. Latar Belakang; b. Rumusan Masalah; dan c. Tujuan PKM (minimal 5 referensi).
Metode Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan
Target luaran a. Tingkat Pemberdayaan b. Artikel Ilmiah PKM; c. Publikasi Media Massa Cetak/Elektronik; d. Video Seluruh Tahapan Kegiatan; dan e. Integrasi PKM ke dalam Pembelajaran.	Realisasi Target luaran a. Tingkat Pemberdayaan b. Artikel Ilmiah PKM; c. Publikasi Media Massa Cetak/Elektronik; d. Video Seluruh Tahapan Kegiatan; dan e. Integrasi PKM ke dalam Pembelajaran. Status Luaran Minimal: a. <i>Submission manuscript</i> ; b. Dokumen sahah keterangan adopsi teknologi oleh mitra; dan c. Tautan video, publikasi media massa cetak/elektronik, dan bahan pembelajaran.
Jadwal PKM a. Tahun ke 1; dan b. Tahun ke 2 (opsional)	Jadwal PKM a. Tahun ke 1; dan b. Tahun ke 2 (opsional).

PROPOSAL PKM	LAPORAN AKHIR PKM (capaian 100%)
Rencana Anggaran Biaya (RAB) PKM <i>disajikan secara tabulatif dan sesuai dengan alokasi skema PKM</i>	Hasil dan Pembahasan a. Hasil; dan b. Pembahasan.
Daftar Pustaka (Harvard Style: minimal 5 referensi)	Realisasi Anggaran Biaya <i>disajikan secara tabulatif</i>
Lampiran a. Curriculum Vitae Ketua Pelaksana dan Anggota; dan b. Dokumen Sahih Profil Mitra.	Daftar Pustaka (Harvard Style: minimal 15 referensi)
	Lampiran a. Bukti capaian luaran; dan b. Bukti kwitansi dan nota realisasi biaya.

Format 1. Cover Proposal PKM Laporan Akhir PKM

PROPOSAL / LAPORAN AKHIR PKM



JUDUL

Tahun ke-.....dari rencana.....tahun

Ketua Pelaksana
Anggota
(Nama Lengkap (tanpa gelar) dan NIDN)

PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SDM KP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Tahun

Format 2. Lembar Pengesahan PKM

HALAMAN PENGESAHAN PKM

Judul :

Lokus Penelitian dan Inovasi :
(LOLITA)

Ketua Pelaksana

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Jabatan Fungsional :

Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Anggota (1)

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Perguruan Tinggi :

Anggota (2)

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Perguruan Tinggi :

Anggota (ke-n)

Nama Lengkap :

NIDN / NIP :

Perguruan Tinggi :

Mitra (opsional)

Penanggung Jawab :

Wilayah/Desa :

Alamat :

Tahun Pelaksanaan :

Usulan Biaya Tahun :

Pertama

Usulan Biaya Tahun Kedua : *kosongkan jika tahun tunggal

Kota, tanggal bulan tahun

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat*

Ketua Pelaksana

(Nama Lengkap)
NIDN/NIP

(Nama Lengkap)
NIDN/NIP

Menyetujui,
Direktur,*

(Nama
Lengkap)
NIDN/NIP

* Direktur dan Kepala P3M dari Institusi Ketua Pelaksana

Format 3. Formulir Penilaian Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat**FORMULIR PENILAIAN REVIEWER
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nama Reviewer :

Instansi :

Judul Proposal

Skema Pengabdian Kepada
Masyarakat :

Kode Proposal :

No	Elemen Penilaian	%(a)	Nilai* (b)	Jumlah (axb)
1	Orisinalitas ide PKM	10		
2	Urgensi topik pengabdian kepada masyarakat	10		
3	Kejelasan metode dan rencana kegiatan	10		
4	Kesesuaian bidang ilmu tim pelaksana	10		
5	Tersedia pendanaan in kind/in cash dari mitra	10		
6	Target luaran	10		
7	Kualitas pemecahan masalah	10		
8	Tingkat keberdayaan masyarakat	20		
9	Kelayakan waktu dan sumber daya	10		
Nilai Akhir ($\sum a \times b$):				

Kesimpulan dan saran:

Hasil Evaluasi

....., Tanggal Bulan Tahun
Reviewer

Skor	Keterangan	Status**
80 -	Diterima	
60 -	Dipertimbangkan	
<60	Ditolak	

Nama Lengkap

* Skala Nilai dari 0 s.d 100

**Berita tanda (V) untuk skor kesimpulan
hasil evaluasi

BAB 3

SKEMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BPPSDM KP menawarkan program pendanaan PKM yang terdiri dari 4 skema yaitu:

- a. Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM);
- b. Skema Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PBK);
- c. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW); dan
- d. Skema Pemberdayaan Riset Terapan (PRT).

A. SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT (PBM)

BPPSDM KP menerapkan paradigma baru PKM dengan pendekatan pemecahan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan. Ruang lingkup, tujuan, luaran, kriteria, sasaran, persyaratan, dan karakteristik Program PBM diatur sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Skema

- a. Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)
mencakup pemberdayaan mitra dari kelompok masyarakat pelaku utama KP, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi perikanan dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha bidang KP.
- b. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PKMKP)
mencakup pemberdayaan mitra dari kelompok masyarakat KP, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi perikanan dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha dengan pendekatan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan.

2. Tujuan Skema

Tujuan dari skema ini, yaitu:

- a. Memberikan pendampingan kepada sekelompok masyarakat KP untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas produksi; dan
- b. Meningkatkan pola pikir menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

3. Luaran Skema

Luaran wajib skema PBM sebagai berikut:

- a. Peningkatan keberdayaan mitra (Pengetahuan/ Keterampilan, produksi/layanan/ pendapatan /pengelolaan);
- b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal PKM;
- c. Satu berita publikasi pada media massa cetak/elektronik;

- d. Video kegiatan berdurasi maksimal 10 menit dan di unggah di kanal youtube serta dipublikasikan pada beberapa platform media sosial; dan
- e. Luaran pada skema ini diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran.

4. Sasaran Skema

- a. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP):
 - 1) Masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industri rumah tangga (IRT) KP, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pelaku utama produktif lainnya;
 - 2) Masyarakat yang kurang produktif secara ekonomis, tetapi berkeinginan kuat menjadi wirausahawan; dan
 - 3) Masyarakat yang kurang produktif secara ekonomi pada poin (ii) terdiri dari masyarakat umum/biasa, masyarakat sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Pesantren dan yang sejenis lainnya.
- b. Sasaran Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PKMKP)
 - 1) Masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: pelaku utama perikanan, mitra sasaran dunia usaha dan dunia industri perikanan, Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan individu/perseorangan diwajibkan mempunyai karyawan minimal dua orang di luar anggota keluarga; dan
 - 2) Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal lima orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok usaha kecil KP, kelompok ibu rumah tangga dan lain-lain.

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin (lingkup KKD dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA)) minimal dua kompetensi yang berasal dari kampus yang berbeda;
- b. Pelaksana PKM hanya boleh mengusulkan skema kemasyarakatan sebanyak tiga kali sebagai ketua dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup skema yang sama;
- c. Pelaksana dapat mengajukan maksimal dua usulan proposal PKM dengan satu skema usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota. Jika dosen tersebut bukan ketua pelaksana,

maka dapat mengusulkan dua skema usulan proposal sebagai anggota; dan

- d. Untuk sub skema PMP dan PKMKP, ketua pelaksana memiliki minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki skor SINTA keseluruhan (*Overall score*) minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang sosial, ekonomi dan kebijakan.

B. SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (PBK)

Skema pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan adalah skema yang dilakukan dengan menggabungkan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan untuk memaksimalkan potensi sumber daya. Potensi sumber daya ini melibatkan anggota sivitas akademika dan berbagai fasilitas seperti *teaching factory* dan unit usaha produktif lainnya sebagai dasar dalam berwirausaha. Program ini dapat melibatkan masyarakat di luar kampus untuk penguatan kapasitas dan dapat dijadikan sarana pengembangan usaha kampus.

1. Ruang Lingkup Skema

- a. Kewirausahaan Berbasis Taruna (KBT)

dikhususkan kepada dosen PTV KKP berdasarkan Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA). Kewirausahaan Berbasis Taruna bertujuan untuk memberikan ruang pelibatan peserta didik (termasuk mahasiswa pascasarjana) dalam seluruh tahapan kegiatan. Program KBT dapat berupa kolaborasi antara dosen, peserta didik, dan pelaku usaha KP dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menghasilkan luaran.
- b. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

Skema ini dilaksanakan oleh dosen PTV KKP berdasarkan Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA) yang diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi dengan pelaku usaha produk/jasa unggulan daerah. PM-UPUD bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan usaha, dan bisnis bagi pelaku usaha bidang KP.

2. Tujuan Skema

Tujuan Skema diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jejaring kerjasama antara program kewirausahaan PTV dengan masyarakat pelaku usaha KP dan lembaga masyarakat lainnya;
- b. Meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan yang dihasilkan oleh mitra usaha agar mampu berkembang dan kompetitif sehingga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya;

- c. Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat PTV ke masyarakat pelaku usaha KP; dan
- d. Mengembangkan proses *link and match* antara PTV dan pelaku usaha KP.

3. Luaran Skema

Luaran Skema diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan level keberdayaan (Pengetahuan/ Keterampilan, produksi/layanan/ pendapatan /pengelolaan);
- b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal PKM;
- c. Satu berita publikasi pada media massa cetak/elektronik;
- d. Video kegiatan berdurasi maksimal 10 menit dan di unggah di kanal youtube serta dipublikasikan pada beberapa platform media sosial; dan
- e. Luaran pada skema ini diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran.

4. Sasaran Skema

- a. Sasaran Skema Pemberdayaan Kewirausahaan Berbasis Taruna (KBT)
 - 1) Taruna sejumlah minimal 5 orang setiap kegiatan berdasarkan program studi, minat dan bakat;
 - 2) Taruna diinkubasi oleh tim pelaksana (dosen) dengan pengetahuan dan kemampuan untuk pembuatan *business plan* hingga penerapannya; dan
 - 3) Pelaku usaha KP yang memiliki produk/jasa pada bidang KP.
- b. Sasaran Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM- UPUD)
 - 1) Sasaran kegiatan ini adalah mitra unit usaha di suatu daerah tertentu yang memiliki produk/komoditas/jasa/budaya-seni KP yang perlu dikembangkan;
 - 2) Keunggulan produk tersebut telah mendapatkan dukungan pemerintah setempat;
 - 3) Mitra yang dilibatkan sudah memiliki aset secara mandiri; dan
 - 4) Kegiatan ini dapat melibatkan taruna dalam pelaksanaannya.

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin (lingkup KKD dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA)) minimal dua kompetensi yang berasal dari kampus yang berbeda;
- b. Pelaksana hanya boleh mengusulkan skema program ini sebanyak tiga kali sebagai ketua dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup skema yang sama;
- c. Pelaksana dapat mengajukan maksimal dua usulan proposal PKM dengan satu skema usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota. Jika dosen tersebut bukan ketua pelaksana, maka dapat mengusulkan dua skema usulan proposal sebagai anggota;
- d. Untuk sub skema KBT dan PM-UPUD, ketua pelaksana adalah dosen yang memiliki minimal jabatan fungsional Lektor, dan skor SINTA keseluruhan (*Overall score*) minimal 50 untuk bidang Saintek dan 25 untuk bidang sosial, ekonomi dan kebijakan; dan
- e. Tim pelaksana harus melibatkan minimal 5 orang taruna per kegiatan.

C. SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS WILAYAH (PBW)

Skema PBW adalah skema yang dilaksanakan dalam rangka membantu berbagai permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan kota, kelurahan, desa atau nagari (nama lain dengan tata kelola yang sama), dan desa adat. Bentuk kegiatan ini bersifat kompetitif nasional dengan durasi pendanaan tahun jamak.

1. Ruang Lingkup Skema

- a. Pemberdayaan Wilayah (PW) diarahkan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat PTV, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini mengaplikasikan hasil riset yang sesuai dengan urgensi permasalahan wilayah.
- b. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) diarahkan untuk (a) mengaplikasikan hasil riset masyarakat PTV yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat, sebagai solusi permasalahan pada desa binaan; (b) Mendampingi mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin; (c) membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah desa binaan, serta membantu mensukseskan terlaksananya program RPJMDes; (d) meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi KP (IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya).

2. Tujuan Skema

Tujuan Skema PW dan PDB diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil kajian terapan masyarakat PTV KKP pada masyarakat wilayah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
- b. Memperkuat sinergi PTV KKP dengan pemangku kepentingan terkait pembangunan kewilayahan dan desa.

3. Luaran Skema

Luaran Skema diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan level keberdayaan masyarakat wilayah dan desa (Pengetahuan/ Keterampilan, produksi/ layanan/ pendapatan/pengelolaan);
- b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal PKM;
- c. Satu berita publikasi pada media massa cetak/elektronik;
- d. Video kegiatan berdurasi maksimal 10 menit dan di unggah di kanal youtube serta dipublikasikan pada beberapa platform media sosial; dan
- e. Luaran pada skema ini diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran.

4. Sasaran Skema

- a. Sasaran Pemberdayaan Wilayah (PW) adalah:
 - 1) Kabupaten/Kota dengan bidang kewilayahan yang berbeda pada setiap program kegiatan;
 - 2) Bidang kewilayahan yang dimaksud adalah: bidang yang terkait dengan kelautan dan perikanan;
 - 3) Kegiatan kewilayahan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah/Kota; dan
 - 4) Melibatkan kelompok masyarakat yang didampingi oleh penyuluh perikanan pada setiap program kegiatan.
- b. Sasaran Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) adalah:
 - 1) Desa (sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa) dan desa adat dengan minimal dua bidang masalah berdasarkan potensi sumber daya KP yang dimiliki oleh desa dan memerlukan kepakaran PTV untuk dikembangkan;
 - 2) Merupakan desa mitra PTV yang menjadi lokasi PKM dosen dan taruna PTV; dan
 - 3) Melibatkan kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap program kegiatan sesuai dengan arah pengembangan desa.

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin (lingkup KKD dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA)) minimal dua kompetensi yang berasal dari kampus yang berbeda;
- b. Pelaksana hanya boleh mengusulkan skema program ini sebanyak tiga kali sebagai ketua dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup skema yang sama;
- c. Pelaksana dapat mengajukan maksimal dua usulan proposal PKM dengan satu skema usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota. Jika dosen tersebut bukan ketua pelaksana, maka dapat mengusulkan dua skema usulan proposal sebagai anggota; dan
- d. Untuk sub skema PW dan PDB, ketua pelaksana memiliki minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki skor SINTA keseluruhan (*overall score*) minimal 50 untuk bidang saintek dan skor 25 untuk bidang sosial, ekonomi dan kebijakan.

D. SKEMA PEMBERDAYAAN RISET TERAPAN (PRT)

Program PRT diarahkan untuk tim pelaksana yang sudah memiliki luaran produk/jasa riset terapan yang akan didiseminasikan melalui skema PRT.

1. Ruang Lingkup Skema

Skema PRT merupakan kegiatan tahun tunggal (1 tahun) yang ditujukan untuk mendiseminasikan produk/jasa riset terapan pelaksana. Skema ini diaplikasikan sesuai dengan urgensi kebutuhan dengan memberikan solusi permasalahan mitra berbasis hasil riset terapan pelaksana.

2. Tujuan Skema

Tujuan Skema PRT diuraikan sebagai berikut:

- a. Mendiseminasikan produk/jasa riset terapan masyarakat PTV KKP sesuai dengan kebutuhan mitra.
- b. Memberikan solusi permasalahan mitra berbasis hasil riset terapan pelaksana; dan
- c. Memperkuat sinergi PTV KKP dengan mitra.

3. Luaran Skema

Luaran Skema PRT diuraikan sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengadopsi luaran produk/jasa riset terapan yang dilengkapi dengan dokumen sah oleh pemangku kepentingan setempat.
- b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal PKM;
- c. Satu berita publikasi pada media massa cetak/elektronik;

- d. Video kegiatan berdurasi maksimal 10 menit dan di unggah di kanal youtube serta dipublikasikan pada beberapa *platform* media sosial.
- e. Luaran pada skema ini diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran.

4. Sasaran Skema

Sasaran Skema ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan ini adalah mitra pengguna produk/jasa hasil riset terapan pelaksana. Hasil riset dari pelaksana harus merupakan IPTEKS yang sudah siap diterap-kembangkan;
- b. Melibatkan mitra dengan unit usaha yang sudah untuk mengembangkan; dan
- c. Melibatkan peserta didik dalam implementasi program skema ini.

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin (lingkup KKD dan Lokus Penelitian dan Inovasi (LOLITA)) minimal dua kompetensi yang berasal dari kampus yang berbeda;
- b. Pelaksana hanya boleh mengusulkan skema program ini sebanyak tiga kali sebagai ketua dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup skema yang sama;
- c. Pelaksana dapat mengajukan maksimal dua usulan proposal PKM dengan satu skema usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota. Jika dosen tersebut bukan ketua pelaksana, maka dapat mengusulkan dua skema usulan proposal sebagai anggota; dan
- d. Untuk skema PRT, ketua pengusul memiliki minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki skor SINTA keseluruhan (*Overall score*) minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang sosial, ekonomi dan kebijakan.

BAB 4

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen perguruan tinggi vokasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pengusul dan pelaksana program pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi vokasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, mitra strategis dalam negeri dan luar negeri dan stakeholder lainnya guna menghasilkan kegiatan dengan luaran yang memiliki nilai kemanfaatan yang luas. Kegiatan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan perikanan dan tridharma dosen dalam hal penelitian dan pengabdian dengan pelaksanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Demikian Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan bagi kemajuan BPPSDMKP.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
KP,



Rudi Alek Wahyudin